

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT

Alifia Nabila Putri¹, Annisa Silvi Elviana², Salsa Sekar Tadji³, Hilma Mutiara Winata⁴

UIN Sunan Gunung Djati

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

alifianabilaputri8@gmail.com

annisaelya456@gmail.com

salsa.st05@gmail.com

hilmamutiawinata@uinsgd.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan masyarakat mengenai kontroversi kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Masalah ini berkaitan dengan perdebatan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekosistem laut, yang merupakan pusat keanekaragaman hayati di dunia. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis sentimen yang diperoleh dari pengumpulan data di media sosial (Instagram dan TikTok), selanjutnya dianalisis menggunakan model IndoBERT. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa mayoritas opini publik dikuasai oleh sentimen negatif yang kuat, yang timbul dari kekhawatiran atas kerusakan lingkungan yang serius serta kurangnya kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Sentimen positif tercatat pada tingkat yang sangat rendah. Pemerintah telah memberikan respon dengan meninjau dan membatalkan izin empat perusahaan tambang yang tidak mematuhi aturan. Kesimpulannya, masyarakat menuntut adanya transparansi dan tanggapan yang lebih baik dari pemerintah dalam membuat keputusan di area konservasi

yang sensitif seperti Raja Ampat.

Kata Kunci: Penambangan Nikel, Raja Ampat, Kebijakan Publik, Media Sosial (Opini Publik)

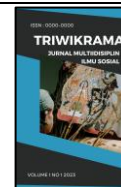
ABSTRACT

This study aims to investigate publik opinion regarding the controversial nickel mining policy in Raja Ampat, which has been widely discussed on social media. This issue relates to the debate between economic interests and the protection of marine ecosystems, which are the center of biodiversity in the world. In this study, sentiment analysis was used to collect data from social media (Instagram and TikTok), which was then analyzed using the IndoBERT model. The results of the analysis show that the majority of publik opinion is dominated by strong negative sentiment, arising from concerns about serious environmental damage and a lack of trust in government policy. Positive sentiment was recorded at a very low level. The government has responded by reviewing and revoking the permits of four mining companies that did not comply with the regulations. In conclusion, the publik demands transparency and a better response from the government in making decisions in sensitive conservation areas such as Raja Ampat.

Keywords: Nickel Mining, Raja Ampat, Publik Policy, Social Media (Publik Opinion)

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, isu penambangan nikel di Indonesia telah menarik perhatian publik, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan peningkatan permintaan nikel sebagai bahan utama untuk baterai kendaraan listrik yang merupakan bagian dari peralihan menuju energi bersih secara global. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil nikel utama di dunia, melihat komoditas ini sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat ekonomi negara

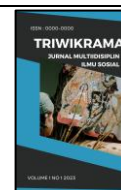


dan mendatangkan investasi asing. Namun, kebijakan pengembangan sektor nikel tidak lepas dari beragam perdebatan, khususnya mengenai dampak lingkungan dan sosial di daerah-daerah penghasil tambang. Salah satu wilayah yang sangat diperhatikan adalah Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Rencana untuk melakukan aktivitas penambangan nikel di daerah ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat, aktivis lingkungan, dan pengamat kebijakan, karena Raja Ampat telah lama dianggap sebagai simbol pariwisata berkelanjutan dan pelestarian laut.

Selain kontroversi lingkungan, isu penambangan nikel juga memiliki dimensi ekonomi nasional. Berdasarkan artikel (Waliuddin Antar, Jodi Fadillah, Muhammad Weka Rifqi, and Mutiara Winata 2024), produksi nikel Indonesia meningkat tajam dari 800 ribu ton (2020) menjadi 2,4 juta ton (2024). Namun, peningkatan ini ternyata belum memberikan dampak signifikan terhadap PDB nasional, meskipun terbukti meningkatkan PDB sektor pertambangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sektor nikel belum berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sehingga memperkuat urgensi untuk menilai kembali manfaat dan risiko kebijakan tambang di wilayah sensitif seperti Raja Ampat. Adapun menurut penelitian (Hendra and Syamsuddin 2025), kegiatan pertambangan di wilayah konservasi menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan berbasis etika lingkungan agar eksploitasi sumber daya alam tidak merusak keberlanjutan kawasan tersebut. Selain itu, (Sah and Satria 2025) menjelaskan bahwa kebijakan perizinan tambang di wilayah tersebut menuai polemik akibat minimnya partisipasi publik serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh (Saputro, Sari, and Putri 2024) menunjukkan bagaimana aktivitas pertambangan dapat berdampak serius pada kualitas lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir. Temuan tersebut relevan dengan konteks penelitian ini karena meskipun wilayahnya berbeda, isu yang dihadapi memiliki pola yang sama, yaitu potensi kerusakan ekosistem dan terganggunya ruang hidup masyarakat akibat aktivitas tambang. Jika di Konawe Utara masalahnya terlihat dari pencemaran langsung di laut, maka di Raja Ampat kekhawatiran serupa muncul sejak tahap perencanaan penambangan, terutama mengingat wilayah ini merupakan kawasan dengan nilai ekologis yang sangat tinggi.

Perdebatan seputar isu tambang nikel di Raja Ampat mencerminkan beragamnya sentimen masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Di media sosial, opini publik terbagi antara pihak yang mendukung kebijakan pemerintah karena dianggap dapat membuka lapangan pekerjaan, dan pihak yang menolak karena menilai tambang mengancam kelestarian lingkungan serta sektor pariwisata bahari. Dengan berkembangnya media sosial sebagai ruang ekspresi publik, muncul banyak data berupa komentar, unggahan, dan diskusi yang mencerminkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu tambang nikel. Melalui pendekatan analisis sentimen, data tersebut dapat diolah untuk mengetahui pola opini Masyarakat, apakah dominan positif, negatif, atau netral terhadap kebijakan penambangan di Raja Ampat. Analisis sentimen menjadi penting karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi publik dan potensi dampak sosial dari kebijakan yang dijalankan. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk memahami tingkat penerimaan masyarakat terhadap aktivitas tambang, sekaligus mengidentifikasi isu-isu utama yang memicu dukungan maupun penolakan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat, dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan opini publik serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Bagaimana sentimen masyarakat terhadap kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat yang ditunjukkan melalui opini publik di media sosial? 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi munculnya sentimen positif, negatif, dan netral masyarakat terhadap kebijakan penambangan



nikel di Raja Ampat? 3) Bagaimana pandangan dan respon pemerintah terhadap beragam sentimen masyarakat mengenai kebijakan penambangan nikel tersebut?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sentimen masyarakat terhadap kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat yang berkembang di media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi munculnya sentimen positif, negatif, maupun netral dalam opini publik mengenai kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pandangan dan tanggapan pemerintah terhadap opini publik yang terbentuk terkait isu penambangan nikel di Raja Ampat. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan baru mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan keputusan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

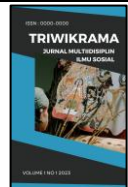
Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik menempatkan kebijakan sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Kebijakan tidak hanya dipahami dalam konteks *government* yang berfokus pada aparatur negara, tetapi juga dalam arti *governance* yang menekankan pada tata kelola sumber daya publik secara kolaboratif. Secara substansi, kebijakan mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan serta pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kesejahteraan publik. (Sujaryanto 2014). Dalam teori kebijakan publik, hak ulayat dan UU No. 32 Tahun 2009 menjadi dasar penting bagi kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hak ulayat menegaskan kewenangan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya di wilayahnya, sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 menekankan perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat pembangunan. Keduanya memperkuat prinsip bahwa setiap kebijakan harus memperhatikan hak masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam teori ini, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai hasil keputusan administratif, tetapi juga sebagai proses sosial dan politik yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok kepentingan. Model-model kebijakan seperti *rational model*, *incremental model* dan *stages heuristic model* menggambarkan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui kompromi antara nilai, kekuasaan, dan kepentingan sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat dirumuskan dan direspon oleh masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. (Hermanu Iriawan 2024). Relevansi kebijakan juga terlihat pada hasil artikel (Waliuddin Antar et al. 2024) yang menunjukkan bahwa meskipun produksi nikel meningkat pesat selama 2020-2024, kontribusinya terhadap PDB nasional masih belum signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan hilirisasi nasional dengan hasil ekonomi yang diperoleh. Dari perspektif teori kebijakan publik, kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perumusan dan implementasi kebijakan pertambangan masih belum menghasilkan manfaat ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan ini memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang seimbang dan saling mendukung. Dalam teori ini, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas



lingkungan dan keadilan sosial yang dihasilkan oleh kebijakan publik. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya sinergi antara efisiensi ekonomi dan konservasi lingkungan melalui tata kelola publik yang responsif. Penerapan teori ini sangat relevan dalam konteks daerah seperti Raja Ampat yang menghadapi benturan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian pariwisata berkelanjutan. Indikator Teori Pembangunan Berkelanjutan yaitu seperti keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, perlindungan terhadap hak hak masyarakat lokal/adat, keadilan sosial dalam distribusi hasil Pembangunan, dan integrasi antara kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial. (Nurzaman and Ghani 2025)

Teori Opini Publik (*Publik Opinion Theory*)

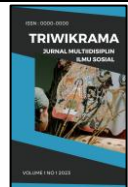
Teori opini publik menekankan pada proses pembentukan pandangan dan sikap kolektif masyarakat terhadap suatu isu yang berkembang di ruang sosial. Menurut Leonard W. Doob, opini publik mencerminkan sikap orang-orang terhadap suatu persoalan sebagai bagian dari masyarakat yang sama, sedangkan Noelle-Neuman menyoroti bahwa opini publik merupakan sikap yang diungkapkan seseorang di hadapan publik agar tidak terisolasi secara sosial. Dalam teori ini, opini publik dipahami sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang mencerminkan pikiran, dugaan, serta harapan masyarakat terhadap suatu isu yang berkembang. Oleh karena itu, pembentukan opini publik menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan pandangan mereka di ruang publik sebagai bentuk kesadaran kolektif terhadap persoalan yang memengaruhi kepentingan bersama. (Aisyah and Hasfi 2021)

Penelitian ini menggunakan teori opini publik dari Walter Lippmann untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terbentuk melalui konstruksi media, terutama dalam ruang digital. Lippmann memperkenalkan konsep *pseudo-environment*, yaitu realitas semu yang terbentuk dari representasi simbolik dan informasi yang dimediasi oleh media, bukan dari pengalaman langsung masyarakat. Masyarakat menilai suatu isu berdasarkan *pictures in their heads* atau gambaran yang terbentuk dari arus informasi yang mereka terima. Melalui analisis sentimen, opini-opini yang terekam dalam bentuk komentar dan unggahan publik dapat menggambarkan bagaimana persepsi kolektif terbentuk dan berkembang, serta bagaimana konstruksi opini tersebut mencerminkan dukungan, penolakan, atau sikap netral masyarakat terhadap kebijakan penambangan yang dijalankan pemerintah. (Puji Rianto 2011)

2. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode analisis sentimen berbasis data media sosial yang diolah menggunakan *platform* Google Colab Model Indobert. Pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengartikan fenomena sosial berdasarkan data angka yang bisa dianalisis secara statistika. Dalam konteks studi tentang pandangan masyarakat, metode ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menilai sejauh mana pandangan publik bersifat positif, negatif, atau netral terhadap kebijakan penambangan nikel serta mendeteksi kekhawatiran terhadap lingkungan, potensi ekonomi, atau ketidakadilan yang muncul dari kebijakan. Metode deskriptif kuantitatif yang dilengkapi analisis sentimen juga memungkinkan hasil riset dihadirkan dalam format diagram, grafik, atau *wordcloud* yang mudah dipahami. Metode analisis sentimen digunakan untuk mengenali dan mengelompokkan emosi atau sikap masyarakat mengenai suatu isu berdasarkan komentar dari postingan media sosial (Instagram dan TikTok).

Sumber data



Peneliti memperoleh data yang berasal dari Media Sosial akun Instagram dan TikTok. Adapun data sekunder yang diambil peneliti berupa jurnal-jurnal, berita, dan juga dokumen kebijakan terkait. Sumber data dari media sosial ini memiliki keuntungan dalam hal kecepatan, aksesibilitas, dan volume data yang besar. Alasannya karena memberikan landasan teoritis dan akademis terhadap hasil analisis sentimen, memperkuat interpretasi data primer. Dengan mengkaji komentar di Instagram dan TikTok, peneliti dapat memperoleh wawasan masyarakat dalam skala yang luas dan dalam waktu yang relevan, yang mencerminkan perkembangan isu dari waktu ke waktu. Platform seperti Instagram dan TikTok kini menjadi ruang publik digital dimana masyarakat dengan bebas menyampaikan pandangan, kritik, dan dukungan terkait berbagai isu kebijakan, termasuk masalah lingkungan dan pertambangan. Melalui komentar pada akun Instagram seperti [@greenpeaceid](#), [@mongabay.id](#), [@storyrakyat](#) dan juga akun [@rian.fahardhi](#), dan juga akun TikTok [@kompas.com](#), [@liputan6.sctv](#), [@DW Indonesia](#), dan [@geraldvincentt](#) peneliti dapat menangkap sentimen masyarakat secara langsung dan alami. Akun-akun tersebut sering mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan, sehingga sangat relevan dengan penelitian ini. Konten yang mereka bagikan umumnya menyentuh isu publik yang sedang hangat, sehingga respon warganet muncul secara spontan dan beragam.

Teknik analisis data

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan analisis sentimen menggunakan pendekatan IndoBert dengan menggunakan *Python* di Google Colab. Rentang waktu pengambilan data (*crawling*) dilakukan pada 17 November 2025 hingga 27 November 2025. Rentang waktu dalam proses Google Colab dilakukan pada 20 November 2025 hingga 29 November 2025.

Crawling → Pre-Processing → Cleansing → Tokenizing

Crawling

Proses analisis dimulai dari pengumpulan data dari Instagram dan TikTok, proses pengumpulan data pada tahap awal penelitian dilakukan melalui *crawling* komentar. Proses *crawling platform* TikTok menggunakan *Apify*, sementara Instagram menggunakan *tools Instans Data Scraper*, dimana data komentar TikTok berhasil mengumpulkan **4.000 komentar**, yang merepresentasikan opini warganet terhadap isu yang dibahas dalam video TikTok. Dataset memuat kolom teks komentar, jumlah like, balasan, username, dan informasi metadata lainnya. Sementara, Instagram memperoleh 3.456 data komentar dari hasil *Crawling* yang mencerminkan ragam respon masyarakat, mulai dari komentar bernada emosional, dukungan, hingga tanggapan netral terhadap isu tersebut. Seluruh data hasil *crawling* kemudian digabungkan ke dalam satu file dan disimpan dalam format Excel untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Pre-Processing

Tahap *pre-processing* dilakukan untuk menyiapkan data komentar agar berada dalam format yang lebih rapi dan seragam sebelum dianalisis. Pada tahap ini, dataset disusun kembali dengan hanya menggunakan kolom berisi teks komentar agar data siap untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian dasar seperti *case folding*, penghapusan elemen non-teks seperti URL dan *emoticon*, penerapan *stopword removal*, serta normalisasi awal terhadap variasi penulisan kata. Proses ini dijalankan menggunakan *library Python* seperti *pandas*, *regular expression* (re), dan modul pemrosesan teks lainnya.

Cleansing

Pada proses *data cleansing*, seluruh komentar Instagram/TikTok terkait kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat dibersihkan dari elemen yang tidak relevan. Proses pembersihan pada penelitian ini meliputi: Normalisasi kata slang/singkatan menggunakan kamus, seperti mengubah teks ke huruf kecil (*casefolding*), menghapus URL emoji, *mention*, *hashtag*, memisahkan tanda baca dari kata-kata, menghilangkan spasi berlebih sebelum normalisasi,

melakukan normalisasi menggunakan kamus, menghilangkan spasi berlebih setelah normalisasi, menghapus spasi sebelum tanda baca, dan menghapus karakter (Pratama et al. 2025).

Tokenizing

Tahap *tokenizing* dilakukan untuk memecah komentar menjadi unit-unit token agar struktur bahasa yang digunakan masyarakat dapat dipahami secara lebih mendalam, sehingga hasil analisis sentimen benar-benar mencerminkan respon publik. Teks di-tokenisasi menggunakan *tokenizer model transformer/ tokenizer IndoBERT-base-uncased*. Proses ini mengubah teks hasil *cleansing* menjadi format angka yang dapat diproses model. Hasil tokenisasi ini kemudian menjadi input utama pada model Roberta untuk proses klasifikasi *sentiment*. Hasil model kemudian dianalisis untuk mengetahui dominasi sentimen positif, negatif, atau netral, serta ditelusuri faktor atau isu yang memicu sentimen tersebut (Nurfritri and Chowanda 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Penambangan Nikel di Raja Ampat Yang Ditunjukkan Melalui Opini Publik di Media Sosial

a. Opini Publik Media Sosial Tiktok

Tabel 1. Data Hasil Representasi Teks

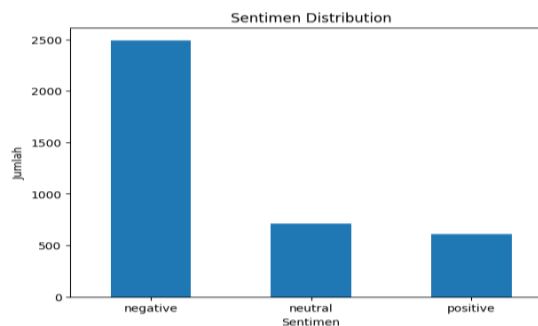
Data Teks Komentar	Sentimen	Score Sentimen
“kenapa aku kangen raja ampat yang dulu”	Positif	0.741713
“asalamualaikum”	Positif	0.705594
“yang untung siapa???”	Negatif	0.996597
“raja ampat loh sampe mau dieksploitasi. keterlaluan”	Negatif	0.999550
“ayo temen kawal terus”	Netral	0.513209
“yang jadi.pertanyaan siapa yang kasih izin nya”	Netral	0.949519

Analisis sentimen terhadap komentar publik di media sosial menunjukkan bahwa isu penambangan nikel di Raja Ampat memunculkan beragam respons masyarakat. Komentar berlabel positif itu adanya ekspresi dukungan maupun kesan emosional yang tidak secara langsung menolak kebijakan tersebut. Sentimen negatif tampak lebih dominan dan intens, ditunjukkan oleh komentar yang mengungkapkan kritik keras serta kekhawatiran terhadap eksploitasi lingkungan dan ketidakadilan. Sementara itu, komentar netral seperti lebih menekankan pada ajakan pengawasan dan permintaan klarifikasi tanpa menunjukkan sikap mendukung atau menolak secara langsung.

Adapun penyajian hasil pelabelan yang mengklasifikasikan komentar ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Distribusi sentimen dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Pelabelan

Index	Sentiment	Count
0	Negative	2490
1	Neutral	712
2	Positive	608



Gambar 1. Grafik Hasil Pelabelan

Berdasarkan tabel dan grafik, sentimen negatif mendominasi percakapan warganet, diikuti sentimen netral, sedangkan positif menjadi kategori paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa topik dalam konten TikTok tersebut yaitu kebijakan pemerintah mengenai tambang nikel di Raja Ampat memicu reaksi publik yang kuat dan cenderung bersifat kritik dibandingkan apresiasi.

b. Opini Publik Media Sosial Instagram

Proses awal penelitian mencakup pengolahan seluruh komentar melalui tahapan pembersihan teks. Hasil dari tahap ini menghasilkan teks yang telah bersih dan terstruktur, serta menampilkan contoh komentar dengan sentimen negatif, positif, dan netral sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Data Hasil Representasi Teks

Data Teks Komentar	Sentimen	Score Sentimen
“namanya juga milih keberlanjutan, lanjut terus rusaknya”	Negatif	0.899690
“semoga kena azab orang yang ngasih perizinan buka nikel di papua”	Negatif	0.997460
“apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai”	Netral	0.800016
“sebagai menteri kehutanan, bagaimana tanggapan anda?”	Netral	0.855778
“terima kasih mas sudah ikut bantu suarakan save raja ampat dari perusakan oleh tambang nikel”	Positif	0.978581
“kami percaya bahwa kemajuan bangsa tidak harus datang dengan merusak. Masa depan adalah milik kita bersama, dan kami memilih berdiri bersama alam, masyarakat adat, dan keberlanjutan.”	Positif	0.986749

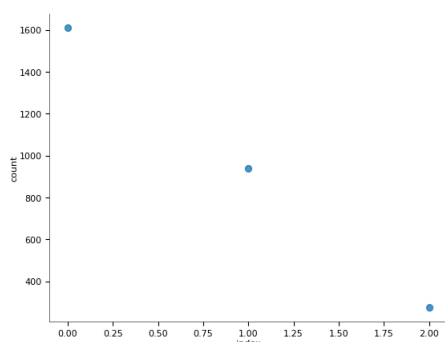
Sumber: (Google Colab, diolah peneliti)

Penyajian data komentar pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh teks telah melalui proses pengolahan awal yang baik. Skor sentimen yang tercantum pada tabel menggambarkan tingkat keyakinan, semakin tinggi skornya, semakin kuat keyakinan model terhadap label yang diberikan. Terlihat bahwa isu penambangan nikel di Raja Ampat menjadi topik yang sensitif dan memicu respon emosional dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari posisi Raja Ampat sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi, sehingga setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam di dalamnya menimbulkan kekhawatiran publik.

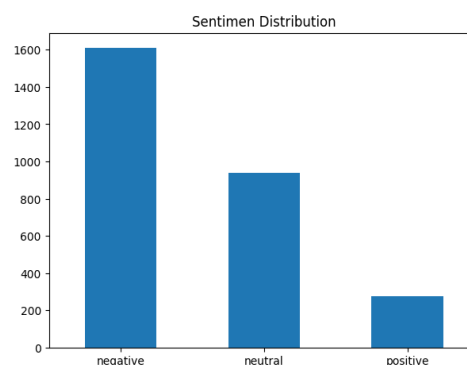
Tabel 4. Hasil Pelabelan

Index	Sentiment	Count
0	Negative	1610
1	Neutral	937
2	Positive	275

Sumber: (Google Colab, diolah peneliti)



Gambar 2. Visualisasi Scatter Plot
Sumber: (Google Colab, diolah peneliti)



Gambar 3. Visualisasi Grafik
Sumber: (Google Colab, diolah peneliti)

Hasil pelabelan sentimen menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat secara jelas didominasi oleh sentimen negatif. Dari total 3.456 komentar yang dianalisis, sebanyak 1.610 komentar termasuk kategori negatif, jumlah yang jauh melampaui komentar netral (937 komentar) maupun positif (275 komentar). Dominasi ini muncul terutama dalam bentuk kekhawatiran publik terhadap ancaman kerusakan lingkungan, potensi terganggunya ekosistem laut Raja Ampat yang dikenal sensitif, serta keraguan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam. Temuan tersebut menggambarkan bahwa persepsi publik cenderung menolak kebijakan penambangan karena dianggap belum memberikan kejelasan mengenai mitigasi dampak ekologis dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Visualisasi melalui *scatter plot*, dan grafik distribusi sentimen kemudian memperkuat gambaran tersebut. *Scatter plot* menunjukkan konsentrasi titik pada kategori negatif di angka 1610 data, netral 937 data, dan positif 275 data. Sementara grafik distribusi menampilkan jarak yang jelas antara volume sentimen negatif dibandingkan dengan netral dan positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat dipersepsikan tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Pola tersebut mencerminkan rendahnya tingkat penerimaan kebijakan (*policy acceptance*), sehingga diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif terhadap kekhawatiran publik terhadap aspek pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan analisis sentimen dari dua platform menunjukkan pola opini publik yang relatif konsisten, yaitu dominasi sentimen negatif terhadap kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat. Komentar negatif muncul dalam bentuk ekspresi kemarahan, kekecewaan, dan penolakan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayah konservasi, komentar netral umumnya berisi ajakan pengawasan dan pertanyaan klarifikasi, sementara komentar positif didominasi ungkapan apresiasi terhadap pihak yang menyuarakan isu lingkungan, bukan dukungan terhadap tambang itu sendiri. Dengan demikian, baik data dari TikTok maupun Instagram sama-sama memperlihatkan bahwa isu penambangan nikel di Raja Ampat memicu reaksi publik yang kuat dan cenderung negatif. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan tambang tidak mendapatkan legitimasi sosial dan dianggap bertentangan dengan nilai keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kawasan konservasi.

Tabel 5. Data Hasil Representasi Teks

Data Teks Komentar	Sentimen	Score Sentimen
“kenapa aku kangen raja ampas yang dulu”	Positif	0.741713
“asalamualaikum”	Positif	0.705594
“mau tidak merespon kelakuan pemerintah tapi merugikan”	Negatif	0.997788
“save raja ampas batalkan proyek tambang di raja ampas”	Negatif	0.722040
“masih ada pt surveyor indonesia, pt samudera mulia abadi dan ada 3 pt lainnya kayanya, kenapa sy bisa tau? karena kita menghandle water suply pt gag nikel”	Netral	0.919882
“yang jadi.pertanyaan siapa yang kasih izin nya”	Netral	0.949519



Gambar 17. *Wordcloud* Positif



Gambar 18. *Wordcloud* Negatif

Melihat daripada hasil pelabelan dan *wordcloud* menceritakan kenangan positif tentang Raja Ampat, serta memberi dukungan pada gerakan “Save Raja Ampat”. Jadi lebih menekankan kepada bentuk harapan dan empati, bukan pujian atau kegembiraan. Sedangkan sentimen negatif disini terlihat mendominasi karena banyak komentar berisi protes terhadap rencana tambang, kekecewaan terhadap pemerintah, kekhawatiran akan kerusakan lingkungan.

Ini menunjukkan persepsi publik yang kuat menolak aktivitas tambang di Raja Ampat. Adapun mengenai sentimen netral berisikan seperti menyebut nama tokoh atau institusi, memberi sapaan, menanyakan fakta tanpa nada emosi. Lebih tepatnya mereka bukan menunjukkan dukungan atau kritik, melainkan berupa respon non-opini. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan terlihat dari sebagian besar masyarakat yang menolak dan merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah terkait tambang nikel di Raja Ampat ini. Maka dari itu, pemerintah diharapkan lebih responsif dan transparan dalam mengambil kebijakan agar tercipta kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap setiap keputusan yang diambil.

Untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi sentimen masyarakat, langkah pertama adalah meninjau beberapa isi komentar yang muncul terkait kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat. Komentar-komentar berikut menjadi dasar dalam menentukan pola sentimen positif, negatif, dan netral.

Tabel 6. Data Hasil Representasi Teks

Data Teks Komentar	Sentimen	Score Sentimen
“jangan serakah pak, miris banget sedih hancur, kerusakan lingkungan karna izin tambang sudah terjadi”	Negatif	0.899690
“solusinya apa kalau pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat”	Negatif	0.997460
“ayo ramai ramai buat tagar, izin share ka”	Netral	0.800016
“jadi inget film avatar”	Netral	0.855778
“ayo jaga surga Indonesia terakhir, selamatkan negeriku, selamatkan Papua”	Positif	0.978581
“bisa bisanya raja empat yang indah dan ekowisata masa depan dan beekelanjutan ada ijin tambang”	Positif	0.986749

Sumber: (Google Colab, diolah peneliti)

Peninjauan komentar ini memperlihatkan bahwa respon yang muncul mencerminkan penilaian publik terhadap substansi kebijakan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta kekhawatiran akan dampak lingkungan. Dalam kerangka kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan, komentar-komentar tersebut menunjukkan bagaimana isu transparansi, partisipasi, dan perlindungan ekosistem turut memengaruhi arah sentiment masyarakat.



Gambar 6. Wordcloud Positif

Sumber: (Google Colab, diolah peneliti)



Gambar 7. Worcloud Negatif

Sumber: (Google Colab, diolah peneliti)

Wordcloud secara keseluruhan memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penambangan nikel di Raja Ampat dipengaruhi oleh kata-kata dominan yang mencerminkan harapan, kekhawatiran, dan kebutuhan informasi. Dari hasil wordcloud, sentimen positif masyarakat terhadap kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat dipengaruhi oleh kuatnya kepedulian terhadap alam dan harapan agar kebijakan tetap menjaga keberlanjutan. Dominasi kata seperti ‘Raja Ampat’, ‘kita’, ‘bisa’, ‘keindahan’, ‘papua’ menggambarkan faktor rasa bangga serta rasa memiliki terhadap Raja Ampat, sehingga mereka berharap kebijakan penambangan tidak merusak citra dan kelestariannya.

Di sisi lain, sentimen negatif muncul karena masyarakat merasa kecewa, marah, cemas terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan munculnya ketidakpercayaan yang makin besar terhadap pemerintah. Hal ini terlihat dari kata ‘rusak’, ‘hancur’, ‘tambang’, ‘pemerintah’, ‘negara’, ‘serakah’ yang menunjukkan adanya persepsi bahwa kebijakan tambang lebih menguntungkan pihak luar dibandingkan masyarakat setempat. Kekhawatiran ini menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak lagi melindungi kepentingan rakyat Papua, sehingga



ketidakpercayaan publik meningkat tajam. Sementara itu, sentimen netral muncul pada komentar yang tidak memuat dukungan maupun kritik, melainkan hanya berisi ajakan membagikan informasi, ucapan terima kasih, penyebutan tagar, atau sekadar menandai pengguna lain. Jenis komentar ini tidak menunjukkan posisi tertentu terhadap kebijakan, sehingga tampil sebagai respon yang lebih seimbang seperti di *Tabel 5*.

Menariknya, dominasi sentimen negatif masyarakat terhadap rencana tambang di Raja Ampat konsisten dengan temuan (Waliuddin Antar et al. 2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan produksi nikel pada 2020-2024 belum memberikan dampak signifikan terhadap PDB nasional. Dengan kata lain, selain dianggap mengancam lingkungan, masyarakat juga melihat bahwa manfaat ekonomi dari sektor nikel tidak sebanding dengan risiko kerusakan ekologis yang akan ditimbulkan. Hal ini menjelaskan mengapa kritik terhadap pemerintah muncul sangat kuat dalam percakapan publik di TikTok dan Instagram.

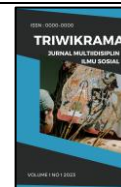
Kesimpulan dari analisis komentar publik di TikTok dan Instagram menunjukkan pola yang sama bahwa kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat cenderung mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Sentimen negatif mendominasi di kedua platform, terutama dipicu oleh kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, ketidakpercayaan pada pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, serta anggapan bahwa keuntungan ekonomi tambang tidak sebanding dengan risiko ekologis. Sementara itu, sentimen positif yang muncul bukan berupa dukungan terhadap kebijakan tambang, melainkan wujud kecintaan masyarakat pada keindahan Raja Ampat dan harapan agar wilayah tersebut tetap dilindungi. Sentimen netral pun lebih banyak bersifat informatif dan tidak menunjukkan posisi tertentu. Konsistensi pola sentimen antara TikTok dan Instagram mengindikasikan bahwa kebijakan penambangan belum memiliki legitimasi sosial dan lebih banyak ditolak dibandingkan diterima oleh publik.

Pandangan Dan Respon Pemerintah Terhadap Beragam Sentimen Masyarakat Mengenai Kebijakan Penambangan Nikel

Kontroversi mengenai pertambangan nikel di Raja Ampat, sebagaimana disampaikan oleh Detikcom dan Tempo, menunjukkan kompleksitas interaksi antara kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan, opini publik, dan reaksi pemerintah terhadap isu lingkungan yang sensitif. Berita dari Detikcom menguraikan dengan jelas bagaimana kegiatan pertambangan di kawasan itu mendapatkan kritik keras karena kemungkinan merusak daerah yang dikenal sebagai salah satu ekosistem laut terpenting di dunia (Detik 2025). Penekanan publik yang meluas mendorong pemerintah untuk segera meninjau izin operasional dari empat perusahaan, yang akhirnya dicabut karena dianggap tidak mengikuti regulasi dan berpotensi membahayakan ekosistem. Hanya PT Gag Nikel yang izinnya tetap dipertahankan, karena dokumen administratif seperti AMDAL, kontrak karya, dan RKAB dinilai sah serta perusahaan ini dianggap sebagai aset negara.

Tempo kemudian menambahkan informasi mengenai berbagai reaksi pemerintah, mulai dari penjelasan kementerian terkait, klarifikasi perihal izin, hingga rencana pengawasan serta evaluasi yang berkesinambungan (Tempo 2025). Ini menunjukkan usaha pemerintah untuk menunjukkan sikap yang seimbang dimana di satu sisi, memperlihatkan ketegasan terhadap perusahaan tambang yang melanggar, sementara di sisi lain mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi yang terkait dengan perusahaan yang masih memiliki izin. Dari kedua sumber tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah sebenarnya menghadapi dilema klasik dalam manajemen sumber daya alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan, namun juga harus memikirkan nilai investasi, potensi pendapatan negara, serta status perusahaan yang memiliki izin resmi.

Kasus Raja Ampat tersebut menyoroti pentingnya tekanan dari masyarakat dan peran media sebagai pengawas eksternal yang bisa mendorong pemerintah untuk lebih transparan, responsif, dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan, terutama terkait area dengan nilai ekologis yang tinggi. Selain itu, isu ini menunjukkan bagaimana konflik kepentingan antara perusahaan,



masyarakat setempat, aktivis lingkungan, dan pemerintah bisa menghasilkan dinamika kebijakan yang lebih adaptif, bukan yang tidak hanya mengikuti prosedur administrasi, tapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan ekologis. Akhirnya, kasus ini memberi wawasan nyata tentang bagaimana kebijakan publik di bidang lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi teknis, tetapi juga oleh tekanan sosial, kepemimpinan politik, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan konservasi, menjadikannya contoh yang relevan untuk memahami hubungan antara konflik kepentingan, respon pemerintah, dan proses pengembangan kebijakan yang lebih akuntabel di Indonesia.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan berdasarkan data sentimen menunjukkan bahwa kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat tidak memperoleh dukungan publik yang memadai dan tidak memiliki legitimasi sosial. Dari total 7.456 komentar, sentimen negatif menempati proporsi terbesar menandakan penolakan kuat terhadap kebijakan tambang. Pola dominan kata seperti rusak, hancur, pemerintah, dan serakah memperlihatkan persepsi publik bahwa risiko lingkungan jauh melampaui manfaat yang dijanjikan. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang menyampaikan justifikasi kebijakan secara transparan dan tidak mampu mereduksi kecemasan publik terkait ancaman ekologis di kawasan konservasi. Dengan demikian, kebijakan saat ini belum memenuhi prinsip *governance* yang responsif yang berbasis data sentimen.

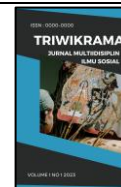
Lebih jauh, studi (Husen, Yulius R. Tidja, and Astra 2025) menunjukkan bahwa meskipun moratorium penting untuk menghentikan sementara penerbitan izin di kawasan sensitif, efektivitasnya di lapangan sering terhambat oleh kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan faktor yang menurunkan legitimasi sosial dan keberlangsungan lingkungan. Hasil ini memperkuat argumen bahwa penolakan publik terhadap tambang di Raja Ampat bukan semata reaksi emosional, melainkan refleksi dari kelemahan struktural dalam pelaksanaan regulasi pertambangan di Indonesia.

Jika dievaluasi menggunakan data ekonomi melalui studi (Waliuddin Antar et al. 2024), kebijakan penambangan nikel juga menunjukkan kelemahan dari sisi rasionalitas ekonomi. Artikel tersebut mencatat bahwa produksi nikel nasional meningkat drastis dari 800 ribu ton (2020) menjadi 2,4 juta ton (2024), namun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Ketidakseimbangan antara ekspansi produksi dan minimnya dampak ekonomi makro ini memperkuat ketidakpercayaan publik: masyarakat melihat bahwa manfaat nasional tidak sebanding dengan risiko kerusakan ekologis yang tinggi di Raja Ampat. Dengan demikian, evaluasi kebijakan berbasis data sentimen dan data ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah perlu meninjau ulang keseluruhan pendekatan kebijakan, karena secara sosial tidak diterima dan secara ekonomi tidak menunjukkan hasil yang proporsional dengan dampaknya.

Melihat kelemahan kebijakan baik dari sisi penerimaan publik maupun rasionalitas ekonomi, perbaikan kebijakan perlu dilakukan melalui langkah yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah perlu membuka dialog dengan masyarakat dan ahli lingkungan, serta memastikan bahwa keputusan tambang didasarkan pada kajian ekologis yang kuat. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan penyampaian aspirasi, sementara pihak industri berkewajiban memenuhi standar perlindungan lingkungan yang ketat. Artikel ini dapat menjadi rujukan untuk memperkuat tata kelola kebijakan agar lebih *responif*, akuntabel, dan selaras dengan keberlanjutan ekosistem Raja Ampat.

4. KESIMPULAN

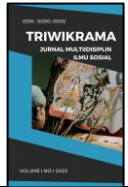
Berdasarkan analisis sentimen terhadap reaksi masyarakat di platform media sosial, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat memperoleh tanggapan dari



masyarakat yang mayoritas berisi sentimen negatif. Sentimen negatif yang kuat ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam serta penolakan publik terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan penambangan nikel di area ekosistem sensitif yang memiliki nilai konservasi yang tinggi. Faktor utama yang memicu sentimen negatif adalah kekhawatiran serius terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem laut seperti terumbu karang dan keragaman hayati, serta kurangnya kepercayaan publik terhadap keterbukaan dan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Pihak pemerintah telah memberikan respon dengan melakukan peninjauan dan mencabut izin empat perusahaan tambang yang diketahui melanggar, sebagai upaya untuk merespon tuntutan masyarakat. Namun, keputusan untuk tetap mempertahankan izin satu perusahaan menunjukkan adanya konflik yang berkelanjutan antara regulasi dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan responisifitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan mengenai investasi di daerah konservasi, dengan menjadikan opini publik sebagai faktor penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat..

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Inny, and Nurul Hasfi. 2021. "OPINI PUBLIK DALAM GERAKAN TAGAR #PERCUMALAPORPOLISI DI MEDIA SOSIAL TWITTER." *Undip E-Journal*.
- Detik, News. 2025. "Kronologi Tambang Nikel Di Raja Ampat Jadi Sorotan Hingga Izin Dicabut." *Detik*.
- Hendra, Sani, and Syamsuddin. 2025. "Konflik Penambangan Nikel Di Raja Ampat : Analisis Etika Lingkungan Dan Rekayasa Pertambangan Untuk Konservasi Berkelanjutan." 4(2):3453-61.
- Hermanu Iriawan. 2024. "Teori Kebijakan Publik." Malang: PT Literasi Nusantara Abadi.
- Husen, Achmad, Benny Yulius R. Tidja, and I. Made Astra. 2025. "Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan Di Indonesia: Systematic Literature Review." *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 6(1):138-46. doi: 10.55448/32sd9m49.
- Nurfitri, Widiya, and Andry Chowanda. 2024. "Analisis Sentimen Pada Kasus Positif Covid-19 Berdasarkan Pemberitaan Media Di Indonesia Menggunakan Indobert." *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer* 20(1):580. doi: 10.35889/progresif.v20i1.1897.
- Nurzaman, Muhamad Khofa, and Fathurahman Ghani. 2025. "PELAYANAN PUBLIK DALAM BAYANG - BAYANG TAMBANG : DILEMA KEBIJAKAN PARIWISATA DI RAJA AMPAT." 3(3):18-27.
- Pratama, Ahlul Yoga, Gauri Ananda Sanjaya, Nadya Khairunisa Lubis, and Muhammad Rangga Aditya. 2025. "Analisis Sentimen Publik Terkait Danantara Menggunakan Algoritma IndoBERT Pada Platform Media Sosial." *METIK Jurnal* 9(1):2025. doi: 10.47002/metik.v9i1.1055.
- Puji Rianto. 2011. "Opini Publik, Agenda Setting, Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Komunikasi* 31-40.
- Sah, Firman, and Hendy Satria. 2025. "Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Kegiatan Penambangan Nikel Di Raja Ampat: Analisis Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan." 3(2):1-4.
- Saputro, Alvito Nugroho, Era Nitika Sari, and Fairus Atika Redanto Putri. 2024. "Analisis Penyelesaian Limbah Tambang Nikel Di Konawe Utara Yang Mencemari Laut Sekitarnya." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan IV (SENASTITAN IV)* (Senastitan Iv):1.
- Sujaryanto. 2014. *Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Candi Muara Takus Sebagai Objek Pariwisata Di Kabupaten Kampar*.
- Tempo. 2025. "Ragam Respons Pemerintah Soal Polemik Tambang Nikel Di Raja Ampat." *Tempo*.
- Waliuddin Antar, Akhdan, Mochammad Jodi Fadillah, Muhammad Weka Rifqi, and Hilma Mutiara



Winata. 2024. “Dampak Produksi Nikel Terhadap Ekonomi Nasional: Pendekatan Intermediasi Melalui PDB Sektor Pertambangan (2020-2024).” *NPASS* 1-16.